

BAB IV

INTERVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KONFLIK SAHARA BARAT ANTARA GERAKAN FRONT POLISARIO DENGAN MAROKO

Dalam bab ini akan digambarkan usaha-usaha yang dilakukan PBB sebagai sebuah organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik di Sahara Barat sesuai dengan tujuan dari piagam PBB. Dalam menentukan status final Sahara Barat ini, cara yang dilakukan meliputi proses teknik mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam proses penyelesaian masa depan Sahara Barat dilakukan beberapa kali pertemuan dan dialog antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh PBB.

Selain itu, akan dijabarkan 3 teknik mediasi sebagai asumsi yang diajukan PBB dalam proses penyelesaian konflik antara Maroko dengan Front Polisario. Akan tetapi sebelum penulis menjelaskan 3 teknik mediasi yang digunakan PBB dalam penyelesaian konflik, disini akan dijelaskan arti dari intervensi itu sendiri, tujuan intervensi dan aktivitas intervensi.

Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik dimana ada negara atau organisasi internasional yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya.⁵⁹ Seperti PBB padahal jika difikirkan masalah di Sahara Barat bukanlah urusan PBB, akan tetapi dikarenakan Front Polisario sudah tidak tahan dengan tindakan yang dilakukan Maroko terhadap rakyat Sahara Barat, maka Front Polisario meminta bantuan kepada PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki tujuan menjaga perdamaian dunia. Dengan mengirimkan pasukan MINURSO pada tahun

⁵⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/intervensi>, diunduh tanggal 7 November 2010

1991 untuk mengawasi referendum di tahun 1992, kemudian karena referendum yang dilakukan tidak mendapat hasil yang memuaskan maka pasukan MINURSO diperpanjang hingga tahun 2008.

Tujuan dari intervensi dalam setiap masalah yang dihadapi suatu negara adalah:

1. Untuk menjamin keamanan dan stabilitas kepentingan negara dan sekutunya.
2. Untuk menunjukkan eksistensi suatu negara atau organisasi dalam pergaulan hubungan internasional.
3. Untuk melakukan perubahan pada negara yang menjadi sasaran perubahan.
4. Untuk memaksakan kehendak suatu negara pada negara lain.⁶⁰

Demikian tujuan dari intervensi PBB dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi suatu negara.

Di Sahara Barat intervensi PBB tidak hanya dengan mengirim utusan berupa pasukan MINURSO saja akan tetapi telah dilakukan perundingan-perundingan yang diprakarsai PBB.

Penulis juga memaparkan Aktivitas intervensi guna menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi suatu negara adalah :

1. Intervensi dilakukan untuk melibatkan diri dalam suatu situasi sehingga dapat mengubah atau menghalangi tindakan atau pengembangan.
2. Untuk mengganggu, biasanya melalui kekerasan atau ancaman kekerasan dalam urusan bangsa lain.⁶¹

⁶⁰ <http://www.thefreedictionary.com/intervensi>, diunduh tanggal 7 November 2010

⁶¹ The America Heritage Dictionary of The English Language Fourth Edition 2000 by Houghtan Wiffin Company.

Aktivitas intervensi yang dilakukan oleh PBB dalam masalah di Sahara Barat yaitu dengan dapat menghalangi tindakan kekerasan yang dilakukan Maroko kepada rakyat Sahrawi di Sahara Barat dengan mengajak Maroko dan Front Polisario duduk bersama dalam setiap perundingan yang diprakarsai PBB.

Berikut penjelasan intervensi PBB lebih dalam dalam 3 tehnik mediasi yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik di Sahara Barat.

A. Komunikator

Komunikator adalah pada tingkat awal mediator cenderung akan membantu komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai karena eskalasi konflik yang terjadi telah membuat hubungan antara pihak-pihak yang bertikai memburuk dan berpengaruh pada terhambatnya para disputan untuk saling berunding dan membuat konsesi bersama. Disini peran mediator diperlukan sebagai komunikator agar terbangun komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bertikai.

PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang sangat berperan dalam menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Untuk itu PBB dituntut melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia. Mekanisme yang dilaksanakan adalah melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi atau melalui badan-badan permanen lainnya yang melibatkan pihak ketiga dan khusus dibentuk guna menyelesaikan sengketa

internasional secara damai melalui forum regional.⁶² Begitu juga halnya dengan penentuan nasib suatu Negara. Salah satu tindakan yang dilakukan PBB di Sahara Barat pasca terjadinya konflik antar Negara yaitu PBB mengirimkan misi melalui Utusan Khusus Sekjen PBB Eric Johnson (1991-1995), James Baker (1995 - 2004), Alvaro de Soto (2004 – 2005), Peter van Walsum (2005-2007), Christopher Ross (2009) dalam rangka masa depan Sahara Barat.

Pada tahun 1991-1995 saat Eric Johnson menjalankan tugasnya sebagai utusan Sekjen PBB dalam menyelesaikan masalah di Sahara Barat komunikasi yang telah dilakukannya sebagai utusan PBB adalah negosiasi dalam mengadakan perundingan untuk mengajak pihak yang bertikai yaitu antara Front Polisario dan Maroko agar mau mengikuti perundingan yang diusulkan oleh wakil dari Sekjen PBB.

Eric Johnson mengadakan perundingan untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh pihak yang bertikai. Setelah diadakan perundingan ternyata hasil yang diharapkan tidak optimal dikarenakan dari pihak Maroko tetap pada keinginannya yaitu berintegrasi dengan Sahara Barat. Sedangkan Sahara Barat tetap menginginkan kemerdekaan atas wilayahnya.

Setelah berakhir masa jabatan Eric Johnson kemudian dia digantikan oleh James Baker (1995-2004). Komunikasi yang dilakukan olehnya hampir sama dengan yang telah dilakukan oleh Eric Johnson yaitu negosiasi, dan hasilnya pada masa James Baker telah diadakan perjanjian yang disebut dengan James Baker I dan James Baker II. Walaupun telah diadakan perjanjian Maroko tetap

⁶² Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Jakarta, 2000. Hal. 217.

saja tidak kooperatif dengan implementasi yang telah disepakati pada saat perundingan.

James Baker masa jabatannya berakhir pada tahun 2004 kemudian digantikan dengan Alvaro de Soto (2004-2005). Alvaro de Soto hanya menjabat satu tahun dikarenakan pihak Maroko lagi-lagi tidak kooperatif dalam melaksanakan perjanjian, dia merasa gagal dalam melaksanakan tugas sebagai utusan Sekjen PBB maka dari itu Alvaro mengundurkan diri karena tidak dapat membantu Maroko dan Front Polisario mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di Sahara Barat.

Alvaro de Soto digantikan oleh Peter van Walsum (2005-2007). Negosiasi yang dilakukan Peter van Walsum yaitu pada tanggal 9 Februari 2005 Peter mendatangi Menteri Komunikasi Maroko untuk mengetahui bagaimana cara dengan mudah berkomunikasi dengan para petinggi Negara Maroko sehingga mereka bisa kooperatif dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Akan tetapi Menteri komunikasi Nabil Ben Abdillah menyatakan bahwa Maroko akan tetap mempertahankan sikapnya atas kesatuan wilayahnya, seraya menyatakan bahwa masalah Sahara Barat tidak dapat diselesaikan kecuali dalam kerangka solusi politik yang komprehensif dengan menghormati kedaulatan dan kesatuan wilayah Maroko. Dengan demikian, posisi Maroko dalam masalah Sahara Barat adalah jelas, yaitu berusaha mencari penyelesaian politik yang definitif, komprehensif dan abadi dengan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Maroko.

Mendengar pernyataan dari Menteri Komunikasi Maroko Peter van Walsum tidak putus asa. Dengan niat baik Peter mengeluarkan idenya dengan mengajak Maroko untuk ikut dalam KTT Arab yang diselenggarakan di Aljazair pada tanggal 22-23 Maret 2005 mendatang. Hal tersebut mendapat reaksi positif dari Raja Maroko Mohammed VI dan berbagai kalangan sebagai langkah awal menuju harmonisasi hubungan Rabat-Alger yang mengalami pasang surut sejak memanasnya isu Sahara Barat pada akhir tahun 1970-an.

Pada tanggal 8 Februari 2005 Menlu Mohammed Benalssa dan delegasi urusan luar negeri Parlemen Inggris mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral, termasuk isu Sahara Barat dan Timur Tengah. Delegasi Parlemen Inggris menegaskan perlunya kerjasama antara Maroko dan Aljazair dalam upaya mencari solusi politik yang adil. Dan pada waktu yang sama Pemerintah AS mengajukan permohonan agar Kongres menyetujui alokasi dana sebesar USD 8,3 juta bagi kepentingan misi PBB (MINURSO) di Sahara Barat.

Membaiknya hubungan kedua negara tersebut diperkirakan akan berdampak positif terhadap Organisasi Uni Maghreb Arab (UMA) yang pada tanggal 17 Februari 2006 genap berusia 16 tahun. UMA merupakan pilihan strategis bagi terciptanya stabilitas dan integrasi negara-negara di kawasan Arab. Diharapkan harmonisasi hubungan Rabat-Alger ini dapat memberikan dampak positif bagi upaya penyelesaian masalah Sahara Barat yang selama ini mengalami *deadlock*.

Pada tanggal 9 Maret 2007 dalam konferensi pers di Madrid saat menghadiri simposium internasional tentang terorisme, Sekjen PBB Kofi Annan menegaskan bahwa masalah Sahara Barat yang dipersengketakan oleh Maroko dan Polisario dukungan Aljazair harus diselesaikan melalui negosiasi yang dilakukan oleh utusan-utusan Sekjen PBB di antara pihak terkait. Penyelesaian akhir atas konflik tersebut harus berasal dari kesepakatan kedua pihak dan dalam hal ini PBB tidak dapat memaksakan solusi tertentu.

Kofi Annan juga mengharapkan agar konflik Sahara Barat dapat diselesaikan secara komprehensif sehingga UMA dapat melaksanakan kembali kegiatannya. Selama ini UMA mengalami kevakuman akibat adanya perselisihan antara dua negara anggotanya, yaitu Maroko dan Aljazair. Selama ini Aljazair memberikan dukungan politik, diplomatik, finansial, dan militer kepada Polisario yang menuntut kemerdekaan atas wilayah Sahara Barat.

Peter van Walsum juga melakukan negosiasi dengan Front Polisario dalam pembebasan 408 sisa tawanan Maroko yang ditahan di Camps Tindouf, intervensi PBB sangat serius dalam pembebasan tawanan tersebut. Dan Polisario telah membebaskan sebanyak 1847 orang tawanan Maroko.

Tindakan kriminal yang telah dilakukan Polisario tersebut sangat bertentangan dengan hukum internasional kemanusiaan, seraya menegaskan bahwa kesaksian yang disampaikan para korban yang masih hidup cukup untuk dijadikan dasar sejauh mana kekejaman yang dilakukan Polisario. Warga Negara Maroko yang meninggal dunia di Tindouf akibat penyiksaan sebanyak

129 ribu orang, termasuk 37 orang lainnya yang meninggal di penjara Boughaz (sekitar 150 km dari ibukota Alger).

Resolusi yang ditawarkan oleh PBB yaitu PBB meminta kedua pihak yang terlibat konflik untuk segera membebaskan semua tahanan yang ditawan sejak awal konflik dan menggarisbawahi pentingnya Maroko berinisiatif untuk membebaskan ratusan tahanan perang dan tahanan politik yang dipenjara di sejumlah penjara Maroko juga. Kepada Front Polisario untuk menghentikan kontak senjata agar dapat terciptanya suasana penyelesaian konflik yang harmonis dengan tidak dibarengi dengan kontak senjata.

Dalam proses penyelesaian konflik di Sahara Barat walaupun sempat mengalami kebuntuan Maroko dan Front Polisario mengikuti ide atau tawaran dari PBB yang mereka anggap sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Dan disaat yang bersamaan juga ketegangan sempat terjadi dikarenakan Maroko mengeluarkan 3 pilihan untuk Sahara Barat merdeka, integrasi dengan Maroko, atau otonomi di dalam Maroko karena Peter van Walsum tidak dapat memberikan penyelesaian dalam masalah ini. Peter van walsum melepas tugasnya. Oleh Sekjen PBB, Kofi Annan dalam jamuan makan siang bersama Presiden Prancis, Jacques Chirac, dan PM Inggris, Tony Blair, tanggal 13 Juni 2007 menyatakan akan mencari ganti Peter van Walsum sebagai upaya lain untuk mencari solusi atas masalah Sahara Barat. Pernyataan Annan ini merupakan respon atas seruan Maroko dan Spanyol agar PBB segera menunjuk seorang utusan khusus untuk Sahara Barat setelah De Soto.

Tanggal 7 Januari 2009 Sekjen PBB Ban Ki Moon mengumumkan Christopher Ross sebagai Personal Envoy Sekjen PBB untuk masalah Sahara Barat. Kunjungan Utusan Khusus PBB untuk Masalah Sahara Barat, Mr. Christopher Ross, ke Aljazair tanggal 21 - 23 Februari 2009, setelah sebelumnya mengunjungi Maroko pada 18 - 19 Februari 2009. Tanggal 20 Februari mengunjungi kamp pengungsi rakyat Sahara Barat di Smara (wilayah Sahara Barat yang dikuasai Front Polisario).

Tanggal 21 Februari Ross mengunjungi kamp Tindouf dan bertemu Mohammed Abdelaziz yang menegaskan kembali: kesiapannya berunding dengan naungan PBB tanpa syarat; dan front Polisario satu-satunya wakil sah rakyat Sahara Barat.

Dalam konferensi pers, Ross menyatakan: dalam lawatan ini pihaknya melihat adanya keinginan jujur dari kedua pihak yang bertikai dan Aljazair untuk mendukung upaya penyelesaian di bawah naungan PBB; pertemuan telah membahas secara mendalam, bermanfaat dan terus terang sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai posisi masing-masing pihak; akan melanjutkan lawatan ke Madrid, Paris dan Washington guna membahas kontribusi yang dapat diberikan untuk memperlancar sidang Manhasset putaran ke-5.

B. Formulator

Formulator adalah mediator bertindak sebagai formulator ketika perundingan berjalan. Konflik yang berlangsung tidak hanya menghambat komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang bertikai namun juga dapat mengakibatkan para disputan sulit berfikir secara jernih untuk menemukan jalan keluar karena pada saat masing-masing pihak bersikukuh dengan pendapatnya. Maka dalam kondisi ini mediator diperlukan lebih dari sebagai komunikator, melainkan sekaligus sebagai perumus jalan keluar (saran) yang dapat diterima kedua belah pihak. PBB mengapresiasi formulator ini melalui kegiatan diadakan pemungutan suara pada 16 Desember 2007 SU PBB atas rancangan resolusi mengenai Sahara Barat atas usulan Aljazair.

Pada tanggal 3 Oktober 2005, para duta besar dari Asia (Indonesia, Iran, India, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Pakistan, Viet Nam, dan Cina) telah diundang oleh Dirjen Asia Oceania Kemlu Aljazair, Mr. Soufiane Mimouni. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pihak Aljazair mengharapkan adanya saling pengertian dari negara-negara tersebut dalam menghadapi penyelesaian masalah Sahara Barat di forum PBB. Dalam hal upaya penyelesaian, kemungkinan harus dilakukan voting atas usul Maroko, dan Aljazair mengharapkan pertimbangan dan dukungan negara sahabat di Asia untuk memberikan suaranya pada tanggal 16 Desember 2007 "tidak dalam posisi abstain," karena posisi abstain dapat diartikan oleh pihak lainnya sebagai suatu dukungan dan tidak menguntungkan bagi bangsa Sahara Barat.

Pada masa James Baker menjabat sebagai wakil Sekjen PBB. SMU PBB ke-59 telah menyelesaikan pembahasan Resolusi mengenai Sahara dengan hasil *voting* 50 suara menyetujui, tidak ada suara menolak dan 100 suara abstain, termasuk Indonesia. Sikap Indonesia tetap pada posisi mendukung usaha-usaha PBB dengan peran serta dari seluruh pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah Sahara secara adil dan diterima oleh semua pihak.

Walaupun pemilihan umum yang telah diprakarsai PBB belum berhasil intervensi PBB sebagai formulator sangat penting dalam penyelesaian konflik di Sahara Barat agar konflik yang terjadi tidak berkepanjangan dan PBB juga ingin mengetahui negara-negara mana saja yang mendukung kemerdekaan atas Sahara Barat menjadi sebuah negara yang memiliki kekuasaan seperti negara-negara lainnya terhadap wilayahnya sendiri. Karena disini PBB berperan sebagai formulator maka PBB harus dapat merumuskan jalan keluar demi penyelesaian konflik antara kedua belah pihak.

Setelah diadakan pemungutan suara banyak dari negara-negara anggota PBB mengeluarkan pendapatnya. Seperti negara Belanda, Kolombia, Chile, Sierra Leone, Cote d'Ivoa, Nigeria, Liberia, Ekuador, Meksiko, Sao Tome and Principe, Gambia Negara-negara tersebut diatas menyatakan dukungannya terhadap otonomi Maroko.

PBB tidak tinggal diam dengan dengan pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan oleh pendukung Maroko. PBB mengadakan rangkaian negosiasi langsung yang kedua antara pihak-pihak (Maroko, Aljazair, Mauritania dan Front Polisario) telah berlangsung pada 10 – 11 Agustus 2007 di Manhasset, New York.

Dalam pertemuan itu para pihak tetap memperiahankan posisinya masing-masing sehingga tidak mengalami kemajuan yang berarti dalam usaha penyelesaian konflik. Namun demikian, Maroko berinisiatif mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan negosiasi langsung putaran ketiga pada waktu dan tempat yang akan disepakati melalui konsultasi dengan Utusan Khusus Sekjen PBB, Peter Van Walsum.

Pada tanggal 31 Oktober 2007 DK PBB telah mengesahkan rancangan resolusi mengenai Sahara Barat secara aklamasi sebagai Resolusi 1783. Resolusi tersebut menyatakan bahwa DK PBB meminta pihak terkait agar melaksanakan perundingan menyeluruh, yang akan memperkokoh posisi Maroko selama ini. DK PBB dalam pengadopsian Resolusi 1783, ditekankan kembali mengenai upaya Maroko yang digambarkan sebagai *serious* dan *credible* dalam Resolusi DK 1754 yang telah diadopsi 30 April 2007. Selain itu, Resolusi 1783 ini memperkuat proses perundingan baru guna mencapai penyelesaian atas Sahara. Terkait dengan masalah ini, DK PBB dalam Resolusi 1783 memutuskan untuk memperpanjang mandat MINURSO hingga April 2008.

Pada tanggal 14-18 Desember 2007 Polisario telah menyelenggarakan Kongres Polisario ke 12 di Tifariti yang terletak di daerah penyangga (*buffer zone*) dan merupakan wilayah terlarang bagi setiap kehadiran militer dan instalasi sipil sesuai kesepakatan gencatan senjata (*cease fire*) antara Maroko dan Polisario yang diproklamkan tanggal 06 September 1991.

Pemindahan ratusan warga/pengungsi secara paksa ke wilayah tidak bertuan (*no man's land*) serta penahanan ratusan warga Sahara di Camp Tindouf

dengan pengawasan ketat yang dilakukan oleh unsure militer Polisario adalah bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan HAM. Tindakan tersebut telah menyebabkan eskalasi ketegangan serta memperburuk situasi di wilayah yang dikenal dengan sebutan *the east of berm*.

Manuver Polisario tersebut dimaksudkan untuk menghambat dinamika positif terkait dengan inisiatif otonomi luas bagi wilayah Sahara yang ditawarkan Maroko yang telah mendapatkan pujian dan penghargaan dari Majelis Umum dan DK PBB melalui Resolusi 1754 dan 1783. Manuver tersebut juga merupakan strategi nyata yang ditujukan guna menghambat proses negosiasi yang tengah berlangsung dimana dalam dua putaran perundingan yang telah berlangsung di Manhasset beberapa bulan lalu Polisario selalu mempertahankan posisinya yang kaku dan mengganggu (*obstructionist*).

Pada tanggal 17 Desember 2007, Majelis Umum PBB secara aklamasi menyetujui Resolusi DK PBB nomor 1754 untuk mengadakan perundingan langsung tanpa syarat disertai dengan itikad baik untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua pihak. Selain itu, MU PBB menghimbau agar kedua pihak terus menunjukkan *political will* dan menciptakan atmosfer baik guna mencapai penyelesaian yang adil, abadi. Penentuan waktu pengambilan keputusan oleh MU PBB tersebut dirasakan sangat tepat mengingat bahwa gerakan separatis Polisario tengah menyelenggarakan Kongres Polisario ke-12 di wilayah *buffer zone* Tifariti yang merupakan wilayah terlarang bagi kehadiran militer dan rakyat sipil.

Sekjen PBB, Ban Ki-Moon menyerukan agar para pihak yang terkait dengan Sahara menggunakan kesempatan baik tersebut untuk mengadakan perundingan yang substantif dan mendalam mengenai Sahara pada perundingan putaran ketiga di Manhasset pada tanggal 7-9 Januari 2008 yang difasilitasi oleh Utusan Khusus Sekjen PBB, Peter Van Walsum.

Perundingan putaran ketiga yang dihadiri oleh Maroko, Polisario, Aljazair, dan Mauritania tersebut memfokuskan pada pengimplementasian Resolusi DK PBB No. 1754 dan 1783 yang menyatakan bahwa PBB menyerukan kepada kedua pihak terkait konflik Sahara agar melakukan perundingan yang didasarkan pada itikad baik dan tanpa syarat.

Dalam perundingan ini kedua belah pihak masih menunjukkan perbedaan persepsi terutama mengenai hal-hal yang bersifat fundamental. Kedua belah pihak tidak menyetujui pelaksanaan *confidence building measure* namun hanya dalam tahap pendiskusian. Akan tetapi kedua pihak memiliki rencana untuk mengadakan pertemuan pendahuluan yang membahas mengenai masalah administrasi, kompetensi dan alat-alat pemerintahan. Disepakati pula bahwa Maroko dan Polisario (didukung Aljazair) akan mengadakan perundingan putaran ke empat pada tanggal 11-13 Maret 2008 mendatang.

Utusan Khusus PBB untuk masalah Sahara Barat, Peter Van Walsum melakukan kunjungan pada tanggal 6 - 14 Februari ke negara-negara Magribi sebagai persiapan negosiasi langsung para pihak yang bertikai putaran ke-4 bulan Maret 2008 pada dasarnya ditujukan untuk melunakkan "blockade attitude" para pihak dan meluruskan kembali niat masing-masing dalam negosiasi.

PBB menyimpulkan kemungkinan bagi penyelesaian konflik Sahara Barat dalam waktu dekat masih belum memungkinkan. Dari pembicaraan dengan para pihak yang terlibat, dia menyatakan kecewa karena sejauh ini belum ada jaminan terlaksananya negosiasi yang lebih substansial pada putaran ke-4 yang akan diselenggarakan bulan Maret 2008 di Manhasset. Kemudian PBB menawarkan kepada Maroko untuk lebih bersabar dalam menghadapi Front Polisario dengan tidak mengabaikan hasil dari perundingan-perundingan yang telah disepakati, dan Front Polisario agar mau mempertimbangkan kembali tawaran dari Maroko berupa otonomi terhadap Sahara Barat.

Setelah PBB menyampaikan ide atau tawaran kepada kedua belah pihak sikap dari Maroko menjadi lebih baik, hasil dari perundingan-perundingan yang telah disepakati diikuti oleh Maroko sebagai jalan keluar dalam penyelesaian konflik begitu pula dengan Front Polisario mereka sempat melakukan sumber terbuka di Rabat baru-baru ini mengungkap dokumen *confidential* yang dirilis NATO mengenai Sahara barat dan Polisario menyebutkan bahwa dukungan historis Aljazair bagi front Polisario lebih dilatarbelakangi kepentingan hegemoni di kawasan Magribi daripada persaingan ideologis. Dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa terbentuknya negara Sahrawi (SADR) yang berdaulat di Sahara Barat akan sangat membantu upaya Aljazair menghambat ambisi Maroko menjadi negara paling berkuasa di kawasan Magribi.⁶³

⁶³ (vide brafaks KBRI Rabat di Jakarta No. RR-010/RABAT/II/08 tanggal 6 Februari 2008), mengenai historis dukungan Aljazair terhadap Sahara Barat.

C. Manipulator

Manipulator (penggerak). Disini derajat keterlibatan mediator mencapai maksimum. Sebagai manipulator mediator menggunakan powernya untuk membawa para disputan melangkah pada kesepakatan, menekan agar menjauh dari konflik dan menuju pada tercapainya persetujuan. Namun pada prinsipnya mediasi merupakan hasil hubungan ketiga teknik diatas. Dengan kata lain mediator tetap menggunakan ketiga teknis diatas dalam setiap proses mediasi, hanya penekanannya yang berbeda, sesuai dengan tingkatan hambatan yang ada dalam perundingan. PBB juga sempat mengeluarkan ancaman kepada Front Polisario dan Maroko jika keduanya tidak mengindahkan usaha yang telah dilakukan PBB demi tercapainya penyelesaian konflik, PBB akan memulangkan pasukan perdamaian MINURSO dan menyudahi intervensi ini. Saat bersamaan Front Polisario mengadakan pembicaraan khusus dengan PBB bahwa Front Polisario sangat berharap bahwa intervensi PBB dalam konflik ini dapat terselesaikan. PBB mengapresiasi manipulator melalui kegiatan menempatkan pasukan perdamaian (MINURSO) pada tahun 1991 hingga tahun 2008.

Kedatangan MINURSO dalam misi perdamaian dan kemanusiaan PBB mandat yang diemban MINURSO di Sahara Barat antara lain:

1. Mengawasi berjalannya gencatan senjata.
2. Melakukan verifikasi atas kesepakatan pengurangan pasukan Maroko di wilayah sengketa.
3. Mengawasi pembatasan pasukan Maroko dan Front Polisario di lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

4. Memastikan pelepasan tahanan-tahanan politik Sahara Barat
5. Mengatur pertukaran tawanan perang yang ditentukan oleh International Committee of The Red Cross (ICRC).
6. Memulangkan pengungsi-pengungsi Sahara Barat.
7. Mengidentifikasi dan mendaftarkan penduduk Sahara Barat untuk persiapan referendum.
8. Mengorganisir dan memastikan sebuah referendum adil dan bebas dan mengumumkan hasilnya.
9. Mengurangi ancaman dari ranjau-ranjau serta ranjau dan artileri-artileri yang belum meledak.

Peacekeepers/pasukan penjaga perdamaian hadir di area misi untuk membantu kesembuhan rakyat dari trauma akibat konflik. Oleh karena itu, mereka disiapkan untuk menerima batasan-batasan sosial dalam hidup pribadi dan publik demi misi yang dimandatkan kepada mereka.

Dalam mengemban misi, harapan masyarakat dunia dan populasi lokal sangat tinggi kepada para peacekeepers harus dijaga dengan baik sebab segala yang mereka lakukan diawasi dengan ketat oleh masyarakat internasional. Baik hal positif maupun negatif yang dilakukan berdampak pada keberhasilan misi secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugas penjaga perdamaian berpegang teguh pada piagam PBB juga ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga hukum perikemanusiaan internasional dimana didalamnya termaktub kode-kode etik serta norma-norma sebagai standarisasi yang harus dipatuhi terutama landasan dasar yaitu hak asasi manusia. Personil peacekeepers membawa nama baik PBB dan

negara mereka sendiri. Jadi, semua peacekeeping personil harus mampu memelihara standar-standar tersebut. Sejauh ini, pasukan penjaga perdamaian telah mampu berfungsi sesuai mandat yang disertai. Gencatan senjata berjalan lancar, hal-hal yang berkaitan dengan pengungsi pun dapat ditangani dengan baik, tidak ada isu-isu pelanggaran HAM, pasukan penjaga perdamaian telah bertugas secara optimal.

Selain itu, anggaran PBB berasal dari kontribusi Negara-negara anggotanya baik itu kontribusi sukarela maupun kontribusi wajib. Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan rutin maupun biaya operasional. Seperti kegiatan pemeliharaan perdamaian, bantuan ekonomi dan sosial serta bantuan pembangunan di berbagai sektor yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. AS merupakan penyumbang terbesar bagi keuangan PBB, sumbangan AS terhadap PBB mencapai 25%. Sehingga setiap masukan, saran dan kritik AS selalu mendapat perhatian dari PBB. Walaupun AS merupakan penyumbang terbesar bagi keuangan PBB, tunggakan AS terhadap PBB pun merupakan yang terbesar dari semua anggota PBB lainnya. Pada tahun 2004 hutang AS mencapai U\$ 1,16 miliar.⁶⁴

Dalam proses penyelesaian konflik Front Polisario – Maroko, AS merupakan Negara yang paling mendukung pernyataan otonomi atas Sahara Barat. AS menganggap dengan pernyataan tersebut akan menciptakan perdamaian di wilayah Afrika Utara. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden AS George W Bush.

⁶⁴ <http://www.apakabar.ws/content/view/945/88888889/> diunduh pada tanggal 20 Juni 2010.

“Sejarah akan membuktikan bahwa otonomi atas Sahara Barat adalah sebuah langkah yang benar, yang akan membawa perdamaian di kawasan Afrika Utara. AS mendukung langkah ini karena kami percaya otonomi akan membawa perdamaian. Dan sekarang panggilan bagi kita telah datang untuk membantu rakyat Sahara Barat mewujudkan perdamaianya.”⁶⁵

Dari tiga besar mengenai bentuk2 intervensi pihak ketiga yang telah disederhanakan⁶⁶ maka bentuk intervensi PBB selaku organisasi internasional pada konflik Front Polisario dengan Maroko:

1. Dilihat dari tujuannya maka tujuan intervensi PBB dalam kasus di Sahara Barat merupakan upaya untuk membantu pihak yang berkonflik dapat berdamai melalui suatu proses perundingan agar menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak⁶⁷. PBB dalam konflik di Sahara Barat bukan seperti badan arbitrase yang berwenang mengeluarkan keputusan yang mengikat. PBB hanya memberikan usulan jalan keluar dari masalah yang ada.

Pengaruh PBB terletak pada kemampuannya untuk merekonsiliasikan kepentingan kedua belah pihak yg berselisih agar mau saling memberikan konsesi. Hal ini terbukti dengan adanya kesepakatan 15 Oktober 2007, Komite IV (*Special Political and Decolonization Committee*), yg menjadi landasan utama pelaksanaan resolusi di wilayah Sahara Barat. Menyusul di tahun 1991, peran PBB dalam wadah pengiriman utusan khusus menunjukkan peran sertanya sebagai mediator sangat terlihat.

⁶⁵ Sahara Barat Langkah Benar, www.republika.co.id, diunduh pada tanggal 5 Juni 2010.

⁶⁶ Keashly & R J Fisher 1990.

⁶⁷ Indonesia brokers Philippines peace bid, <http://www.insideindonesia.org/edit50/wiry.htm>

2. Dalam mediasi terdapat suatu proses yang mencirikan perbedaan antara mediasi dengan bentuk intervensi lain yakni manages bargaining dilakukan oleh mediator manakala masing-masing pihak yang bertikai tuntutan yang berbeda agar pada akhirnya persetujuan tercapai. Dalam konflik di Sahara Barat ini, PBB telah melakukan proses manages bargaining atas tuntutan-tuntutan pihak yang bertikai untuk mau memberikan konsesi dalam setiap perundingan. Seperti pada waktu perundingan-perundingan yang telah diselenggarakan pihak PBB, pada awalnya kerjasama antara Front Polisario dengan Maroko sangat diharapkan untuk dapat berfikiran jernih dalam setiap perundingan.

Adapun pihak Front Polisario sangat menentang tuntutan Maroko yang ingin memberikan otonomi penuh kepada Sahara Barat. Ini dinilai berseberangan dengan konstitusi Maroko. Manages bargaining yang diupayakan PBB adalah dengan munculnya usulan otonomi atas Sahara Barat demi mencapai perdamaian bagi masyarakat Sahrawi.

3. Manages bargaining lain yang dilakukan PBB adalah pada detik-detik kesepakatan 2005 tercapai dimana terdapat 3 ganjalan masalah mengenai otonomi, berintegrasi dengan Maroko atau merdeka bagi Sahara Barat. Berbagai kesepakatan atas tiga masalah krusial tersebut dibahas dalam pertemuan tingkat teknis pada rentang waktu 2005-2009 dan masih diperjuangkan hingga sekarang.
4. Dari tahun 1991-2009 PBB dalam menangani kasus di Sahara Barat memiliki komitmen untuk terus mengupayakan pihak pemerintah Maroko dengan

Sahara Barat agar mau duduk bersama untuk berunding, partisipasi PBB sebagai mediator dijelaskan sebagai mediasi plus-plus-plus.⁶⁸ Upaya mediasi PBB meliputi jasa-jasa baiknya dalam bentuk tim penyelidik, identifikasi masalah melalui public hearing, sebagai tuan rumah pelaksanaan perundingan membantu merumuskan segala persiapan dan mekanisme yang diperlukan bagi implementasi kesepakatan dan juga PBB memberi tekanan dan sanksi terhadap pihak-pihak yg dinilai tindakannya dapat memperburuk situasi sebelum dan sesudah perundingan.

Menurut penulis PBB dipilih sebagai mediator dalam kasus di Sahara Barat karena PBB dianggap telah memiliki 3 unsur penting yang harus dimiliki oleh pihak ketiga dalam membantu keluar dari konflik. Ketiga unsur tersebut adalah *acceptability* (kesediaan kedua belah pihak yang berkonflik untuk menerima hadirnya mediator), *impartiality* (sifat tidak memihak, adil), *neutrality* (netralitas). Namun demikian Moore 1986 tetap menyebutkan bahwa "*no one can be entirely impartial*".

Apabila dalam suatu proses mediasi, seorang intervensor bersikap cenderung terhadap suatu pihak hal itu dimaksudkan sebagai usaha untuk menyeimbangkan power (pihak-pihak yang bertikai) atau empowermet power karena agar perundingan berjalan efektif maka power pihak-pihak yang berunding tidak boleh terdapat kesenjangan atau harus seimbang. Hal inilah yang menyebabkan dalam suatu proses intervensi intervensor tidak selalu

⁶⁸ (soliman M Santos JR, Islamic diplomacy consultation & consensus sumber www.cr.org/accrod6/santos.shmtl).

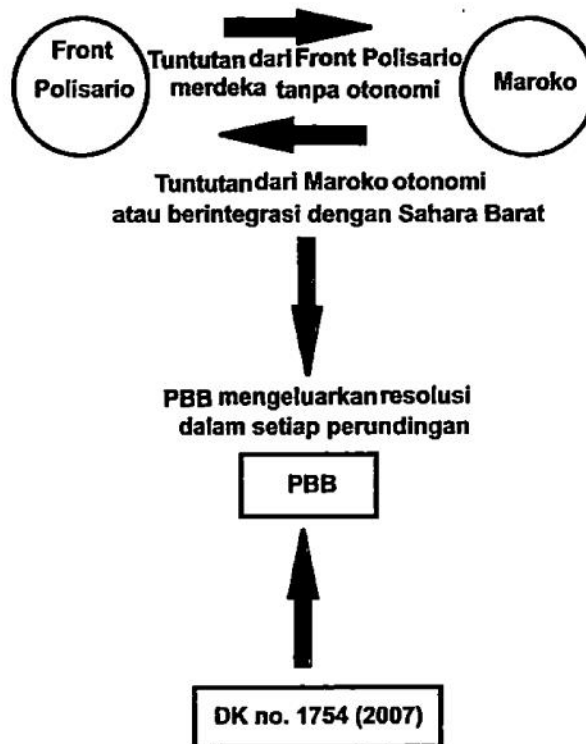
dapat mempertahankan jarak yang sama antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Begitu pula dengan PBB dalam konflik di Sahara Barat ini tidak dapat betul-betul bertindak secara impartial. Hal ini dimaksudkan sebagai cara PBB untuk menyeimbangkan power antara Front Polisario dengan Maroko ketika melakukan perundingan karena jika dikalkulasi maka kekuatan Maroko lebih besar secara keseluruhan dibandingkan dengan para pejuang Front Polisario yang termarjinalkan sejak lama.

Adanya kesetaraan power dari tiap disputan akan membantu mediator secara efektif, namun jika tidak seimbang akan menghasilkan penyelesaian yang tidak memuaskan bagi pihak lain dan persetujuan tidak akan tercapai, atau resolusi yang dihasilkan justru menimbulkan konflik baru. Jika terdapat kekuatan yang tidak seimbang, maka selanjutnya mediator akan memutuskan apakah dan bagaimanakah untuk membantu pihak yang lemah tersebut.

Berikut ini diagram untuk menjelaskan bentuk intervensi PBB dalam konflik di Sahara Barat.

Gambar 5. Diagram Intervensi PBB dalam konflik di Sahara Barat
Sumber dari Loreleigh Keashly & R J Fisher



Dalam upaya pencapaian kemerdekaan Sahara Barat intervensi PBB sangat besar, proses mediasi (intervensi pihak ketiga) dalam penyelesaian mengenai kasus Sahara Barat dirintis kembali setelah kejadian puncak di tahun 2005. DK PBB secara konsensus mengesahkan Resolusi 1570 untuk memperpanjang kehadiran MINURSO selama 6 bulan hingga 30 April 2005, yang kemudian diperpanjang kembali berdasarkan Resolusi 1592 hingga 31 Oktober 2005. Konferensi Pers di New York tanggal 26 Juli 2005, jubir

Sekjen PBB, Stephan Dujaric menyampaikan bahwa Kofi Annan telah resmi menunjuk Peter van Walsum, seorang diplomat Veteran dari Belanda, sebagai Utusan Pribadi Sekjen PBB untuk Sahara Barat menggantikan Alvaro de Soto. Pada tanggal 8 September 2005, Sekjen PBB Kofi Annan telah menunjuk Jenderal Court Mouzcard sebagai komandan baru Misi Perdamaian untuk Sahara Barat (MINURSO) yang mulai bertugas di wilayah tersebut tanggal 12 September 2005. Pada tanggal 14 Desember 2006, telah diadakan pemungutan suara pada SU PBB atas rancangan resolusi mengenai Sahara Barat atas usulan Aljazair. Kegiatan ini pun tidak berjalan dengan lancar dikarenakan Maroko tidak bersikap kooperatif dengan resolusi yang dikeluarkan.

Sebagian Negara ada yang menyatakan dukungan dan menolak kemerdekaan Sahara Barat, namun ada juga sejumlah Negara yang belum menentukan sikap masih menunggu dan melihat (*wait and see*). Walaupun mayoritas penduduk Sahara Barat beragama islam, tidak lantas membuat sejumlah Negara Islam di dunia mengakui kemerdekaan tersebut. Pada umumnya pernyataan sikap demikian dilakukan dikarenakan ketakutan Negara-negara akan adanya tindakan separatisme di dalam negaranya, dengan adanya dukungan atas kemerdekaan Sahara Barat menimbulkan kekhawatiran akan menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah lainnya yang ingin memisahkan diri. Seperti Indonesia, Iran, Malta, Afrika Selatan, Armenia, Bangladesh, Brazil, Irael, Kanada, Korea Selatan, Singapura, Selandia Baru, dan Ukraina.

Sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia cukup beralasan, mengingat terdapatnya sejumlah gerakan yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Dengan pengakuan kemerdekaan Sahara Barat akan menjadi pemicu bagi gerakan-gerakan separatis yang juga ingin menyatakan merdeka dan terpisah dari Indonesia. Seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berhasil diredam setelah dilakukan perundingan yang menghasilkan Memorandum of Understanding antara RI dan GAM. Begitu juga halnya dengan permasalahan separatis di Papua yang dapat ditekan dengan memberikan otonomi khusus. Sedangkan di Iran juga terdapat gerakan separatis Suku Kurdi dan Azerbaijan, Pakistan memiliki kantong-kantong etnis dan ideologis.

Dari berbagai reaksi Negara-negara diatas menunjukkan setiap Negara memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda untuk mengakui dan menolak kemerdekaan Sahara Barat. Disatu sisi kemerdekaan Sahara Barat merupakan hak setiap Negara untuk meyakini merdeka dan berdaulat. Sedangkan di sisi lain kemerdekaan tersebut merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan terhadap suatu Negara.

Tabel 1
Dinamika Intervensi PBB dalam penyelesaian konflik di Sahara Barat

MODEL INTERVENSI	ISI/CONTENT INTERVENSI	AKTIVITAS INTERVENSI	IMPLIKASI KONFLIK
1.Komunikator	<p>1.Pembicaraan antara Front Polisario dengan Maroko sebagai langkah awal dalam penyelesaian masa depan Sahara Barat.</p> <p>2.PBB memfokuskan kepada pemberhentian kontak senjata antara Maroko dan Front Polisario sehingga penyelesaian konflik yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.</p> <p>3.Pembebasan tawanan dari kedua belah pihak yaitu Front Polisario dan Maroko.</p>	<p>Mengirim utusan khusus Sekjen PBB:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Eric Johnson (1991-1995) 2.James Baker (1995-2004), 3. Alvaro de Soto (2004 – 2005). 4.Peter van Walsum (2005-2007), 5. Christopher Ross (2009-sekarang) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meredanya konflik kekerasan di Sahara Barat dengan perjanjian James Baker I dan II 2. Keamanan dan stabilitas di daerah konflik terjamin. 3. Menghalangi tindakan kekerasan yang akan dilakukan pihak yang berkonflik. 4. Membaiknya hubungan antara dua negara Rabat-Alger. 5. Bebasnya semua tahanan di Maroko dan Polisario.
2.Formulator	<p>1.PBB memfokuskan dengan memberikan waktu kepada Front Polisario: untuk mempertimbangkan kembali otonomi yang ditawarkan oleh Maroko terhadap Sahara Barat.</p> <p>Maroko: untuk lebih bersabar dalam menghadapi Front Polisario dengan tidak mengabaikan hasil dari perundingan-perundingan yang telah disepakati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengundang para duta besar dari berbagai Negara. 2. Mengadakan pemilihan umum pada tanggal 16 Desember 2007. 3. Mengeluarkan Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya anggota yang abstain pada saat Pemilihan Umum. 2. Mengetahui berapa persen Negara yang mendukung kemerdekaan atas Sahara Barat. 3. Mengorganisir dan memastikan sebuah referendum adil dan bebas dan. 4. Menyeimbangkan kekuatan antara Maroko dan Sahara Barat. 5. Keinginan Sahara Barat untuk merdeka semakin kuat

3.Manipulator 4	1.Ancaman Dari PBB Berupa Pemulangan Pasukan Khusus MINURSO Dan Menyudahi Intervensi PBB Dalam Penyelesaian Konflik Di Sahara Barat. 2.Manages Bargaining yaitu usulan otonomi atas Sahara Barat demi mencapai perdamaian bagi masyarakat Sahrawi.	Mengirim utusan khusus MINURSO (1991-2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gencatan senjata untuk mengamankan wilayah konflik berjalan lancar. 2. Verifikasi atas kesepakatan pengurangan pasukan Maroko di wilayah sengketa berjalan lancar. 3. Pembatasan pasukan Maroko dan Front Polisario di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. 4. Pelepasan tahanan-tahanan di Sahara Barat dan Maroko. 5. Pertukaran tawanan perang yang ditentukan oleh International Commetee of The Red Cross (ICRC). 6. Memulangkan pengungsi-pengungsi di Sahara Barat 7. Mengidentifikasi dan mendaftarkan penduduk Sahara Barat untuk persiapan referendum 8. Mengorganisir dan memastikan sebuah referendum adil dan bebas dan mengumumkan hasilnya. 9. Mengurangi ancaman dari ranjau-ranjau serta artileri-artileri yang belum meledak
--------------------	---	--	---

Sumber : Dari berbagai sumber